Perlindungan Hukum Masyarakat sebagai Nasabah pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Binjai (PT. Bank Syariah Indonesia ex. PT. Bank BRI Syariah Cabang Binjai)

Legal Protection of Community as Customers in Sharia Banking Financing Contract in Binjai City (PT. Bank Syariah Indonesia Ex. PT. Bank BRI Syariah Binjai Branch)

Utary Maharani Barus^{1)*}, Yefrizawari²⁾, T. Keizerina Devi Azwar³⁾ & Rifany Arbita Lubis⁴⁾

1)2)3)Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

4)Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: utary75@gmail.com

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait Akad Pembiayaan di PT BSI ex. BRI Syariah Cabang Binjai. Kelompok masyarakat yang ditunjuk adalah masyarakat yang terletak di Jalan Baskom Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Sumatera Utara. Metode yang digunakan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Kajian ini menyimpulkan bahwa pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai nasabah terkait sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mengenai akad pembiayaan perbankan Syariah dan kesadaran hukum nasabah guna meminimalisir resiko serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari setiap akad pembiayaan yang dibuat nasabah dengan pihak bank syariah.

Kata Kunci: Akad Pembiayaan; Perbankan Syariah; Perlindungan Hukum.

Abstract

This article is intended to explain education to the public regarding the Financing Contract at PT BSI ex. BRI Syariah Binjai Branch. The designated community group is the community located on Jalan Baskom, Nangka Village, North Binjai District, North Sumatra. The method used is normative and empirical juridical. Data were collected and analyzed qualitatively from a statutory approach and a sociological juridical approach. This study concludes that the importance of educating the public as customers is related to efforts to increase knowledge about Islamic banking financing contracts, and legal awareness of customers in order to minimize risk and to find out how the legal protection of each financing contract made by customers with Islamic banks.

Keywords: Financing Contract; Sharia Banking; Legal Protection.

How to Cite: Barus, U.T. Yefrizawari. Azwar, T.K.D. & Lubis, R.A. (2021). Perlindungan Hukum Masyarakat sebagai Nasabah pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Binjai (PT. Bank Syariah Indonesia ex. PT. Bank BRI Syariah Cabang Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 14 (2): 124-130.

PENDAHULUAN

Keberadaan bank syariah di Indonesia muncul untuk melayani kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan syariah. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, perbankan syariah harus memiliki pangsa pasar yang tinggi. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bank Umum Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan komersial sesuai dengan prinsip Syariah, yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Keuangan Rakyat Syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam adalah bank yang mematuhi aturan Syariah Islam, terutama dalam kegiatan yang terkait dengan prosedur Muammal Islam. Masuk Islam menghindari praktik yang mungkin mengandung unsur riba. Praktik-praktik ini harus diisi dengan kegiatan bagi hasil dan *trade finance* atau investasi berdasarkan praktik bisnis yang dilakukan pada masa profetik atau bentuk bisnis. Meskipun sudah ada sebelumnya, namun tidak dilarang oleh syariat Islam (Wibowo, 2005).

Bank syariah diakui keberadaannya secara hukum normatif dan hukum empiris di Indonesia. Sementara persetujuan peraturan perundang-undangan diatur dalam undang-undang dan peraturan Indonesia, secara empiris bank syariah yang *legal* menawarkan peluang dan peluang besar untuk berkembang di seluruh Indonesia (Sjahdeni, 2007). Hal inilah yang membedakan bank syariah dengan bank biasa karena bank syariah harus tunduk dan patuh pada prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Peraturan Bank Indonesia No. Menurut 10/16/PBI/2008, Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah harus ditaati dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan pokok syariat Islam, antara lain: Asas keadilan dan keseimbangan ("*adl wa tawazun*"), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (alam) dan tidak

mengandung mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan objek haram. (Al-Arif, 2005).

Salah satu produk Perbankan Syari'ah yang banyak digunakan masyarakat selain sebagai wadah penyimpanan dana adalah salah satunya berupa pembiayaan. Terdapat banyak akad pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musaqah*, *ijarah*, *salam*, *istishna'*, dan lain sebagainya (Fashri, 2007). Adanya bermacam-macam akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan masing-masing individu. Dalam hal ini terdiri dari 3 akad yang penggunaannya paling banyak yaitu *Mudharabah* 100% (seratus persen) dana dari bank syari'ah, *Musyarakah* (Bank Syari'ah dan nasabah memberikan porsi dana masing-masing (kesepakatan dalam akad pembiayaan)), dan *Murabahah* (Jual beli (keuntungan disepakati), berupa: rumah KPR, mobil, sepeda motor, dan lain-lain) (Wangsawidjaja, 2012).

Dalam melakukan perjanjian antara pihak perbankan syari'ah dengan masyarakat dilakukan dalam bentuk akad. Akad-akad tersebut tentunya diperbolehkan dalam Islam asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Terkadang terdapat beberapa catatan khusus pada akad tersebut agar terjauhi dari unsur yang dilarang dalam Islam (Jundiani, 2009). Bentuk akad dan objek yang tertuang dalam akad berbeda-beda sesuai dengan yang dipilih oleh masyarakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu akad perbankan yang digemari masyarakat adalah akad pembiayaan. Banyaknya nasabah yang menggunakan akad pembiayaan membuat bank terus melakukan penawaran-penawaran menarik kepada masyarakat untuk tertarik pada akad pembiayaan tanpa masyarakat tahu mengenai hal-hal pokok serta perlindungan hukum yang

berhak mereka dapatkan sehubungan menjadi nasabah pada perbankan syari'ah.

Salah satu perbankan syari'ah yang ada di Indonesia yang menghadirkan akad-akad perbankan syari'ah adalah PT Bank BRI Syari'ah. PT BRI Syari'ah yang dulu disebutkan sekarang sudah melakukan *merger* perusahaan sehingga kini berubah menjadi Bank Syari'ah Indonesia. Dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah, penghimpunan dana perbankan syari'ah, jenis-jenis akad pembiayaan, serta yang paling penting adalah mengenai perlindungan hukum nasabah pembiayaan perbankan syari'ah.

Sosialisasi dan pengenalan mengenai perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan ini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan masyarakat Indonesia yang menggunakan produk perbankan khususnya pada lembaga perbankan syari'ah meyakini dan mempercayai bahwa lembaga ini akan menjalankan berbagai kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diadakannya edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen di lembaga perbankan syari'ah.

Maksud dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. Hal ini menjadi urgensi hukum dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki nasabah sebagai konsumen dari bank syari'ah yang wajib melaksanakan segala bentuk kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Tujuan Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai

perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan perbankan syari'ah; Untuk meningkatkan dan menyadarkan masyarakat agar kritis dalam berhadapan dengan segala jenis perjanjian yang akan dibuat khususnya akad pembiayaan perbankan syari'ah; Meningkatkan kesadaran perbankan syari'ah untuk lebih mengutamakan pemahaman masyarakat sebelum akad pembiayaan dilaksanakan untuk menghindari resiko.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan, menganalisa, menelaah, serta menjelaskan perihal Perlindungan Hukum Masyarakat sebagai Nasabah pada Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Kota Binjai (PT. Bank Syari'ah Indonesia Ex PT. BRI Syari'ah Cabang Binjai. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *Library Research* (Studi Pustaka) dan *Field Research* (Studi Lapangan) melalui wawancara dengan informan/narasumber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan di Kelurahan Nangka Binjai Utara dilaksanakan dengan memberikan edukasi mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syari'ah, di Kelurahan Nangka Binjai Utara. Dalam kegiatan ini turut menghadirkan Operational Manager PT Bank Syari'ah Indonesia (PT Bank BRI Syari'ah ex Cabang S.Parman Medan) sebagai Informan/Narasumber, dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang dihadiri juga oleh Mitra pelaksana

sekaligus masyarakat Muslim setempat yang membutuhkan informasi dan sosialisasi terkait Perlindungan Hukum Nasabah Akad Pembiayaan Perbankan Syariah. Adapun lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara yang mayoritas masyarakatnya muslim.

Kenyataan yang diambil berdasarkan sample penelitian dilapangan, minimnya kesadaran dan pengetahuan konsumen/nasabah perbankan syariah menjadikan posisi nasabah selaku konsumen perbankan syariah menjadi lemah, sehingga memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak perbankan untuk memanfaatkan keadaan konsumen yang minim kesadaran dan pengetahuan akan akad pembiayaan di perbankan syariah. Banyaknya produk-produk perbankan syariah akhir-akhir ini harus diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat (konsumen/nasabah) agar nasabah dapat memilih dan memilah berbagai produk yang ditawarkan sejauh mana manfaat, implikasi, hak dan kewajiban serta langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat ditempuh nasabah ketika mendapat kerugian dari akad-akad tersebut. Perlindungan hukum nasabah terhadap perbankan syariah perlu di edukasi secara mendalam adalah bentuk dari penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Shidarta bahwa salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat yang mana seperti yang diketahui perbankan syariah merupakan perbankan yang sistem perbankannya belum lama lahir di Indonesia serta regulasi peraturan perundang-undangannya belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum terhadap nasabah/konsumen sehingga sangat mungkin melahirkan berbagai bentuk kesalahpahaman hingga masalah dalam praktek yang merugikan nasabah.

Regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Hukum Islam sudah dipositivisasi untuk dijadikan

sebagai landasan hukum perbankan syariah. Beberapa diantaranya adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Bank Syariah, regulasi di sektor pasar modal syariah dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut berasal dari Hukum Islam yang tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN).

Bisnis perbankan syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Nasabah memilih perbankan syariah sebagai tempat untuk menyimpan dana didasarkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di perbankan syariah sesuai dengan Hukum dan Syariat Islam, sehingga dapat memberikan jaminan dunia dan akhirat bagi nasabah. Hal ini didapatkan berdasarkan wawancara yang dilakukan secara langsung berdasarkan penelitian di Kelurahan Nangka Kota Binjai. Dalam prakteknya diketahui bahwa perbankan syariah yang dipilih oleh nasabah cenderung menonjolkan dikotomi produk-produk bisnis perbankan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah islam. Seperti contoh yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Kelurahan Nangka disimpulkan pada tabel di bawah ini :

Keterangan	Jumlah	Persentase
Masyarakat yang hadir	25 Orang dari 30 undangan	83%
Masyarakat Nasabah Bank Syariah	15 Orang dari 25 yang hadir	60%
Masyarakat Non Nasabah Bank Syariah	10 Orang dari 25 yang hadir	40%

Masyarakat Nasabah Akad Pembiayaan Bank Syariah	7 orang dari 25 Yang hadir	28%
Masyarakat Non Akad Pembiayaan Bank Syariah	8 orang dari 25 Yang hadir	32%

Berdasarkan tabel diatas lebih dari setengah masyarakat adalah nasabah dari perbankan syariah. Dari hasil kuisisioner yang disebarkan kepada masyarakat, hampir 50% masyarakat baik nasabah maupun yang bukan nasabah bank syariah tidak memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai akad pembiayaan yang ada di perbankan syariah yang mana dalam menjalankan segala jenis kegiatannya harus berlandaskan prinsip syariah. Masyarakat tidak mengetahui secara pasti mengenai hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai nasabah dari perbankan syariah terutama dalam kegiatan akad pembiayaan, maupun mengenai resiko hukum yang akan diterima dalam akad pembiayaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan nasabahnya. Mereka hanya mengetahui mengenai kewajiban mereka untuk membayar sejumlah uang yang telah mereka peroleh dari akad pembiayaan maupun kegiatan menyimpan dan ke bank syariah. Untuk itu perlu dilakukan edukasi yang konsisten dan berkelanjutan mengenai perlindungan hukum nasabah agar tidak merugikan masing-masing pihak dalam melakukan suatu akad pembiayaan di bank syariah. Dalam hasil wawancara juga didapatkan bahwa hampir seluruh masyarakat yang hadir tidak mengetahui apakah kegiatan usaha yang dilaksanakan di perbankan syariah sudah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Undang-undang Perbankan Syariah yang berlaku di Indonesia tidak memberikan regulasi yang tegas mengenai perlindungan hukum nasabah atas praktik-praktik perbankan syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mana masalah tersebut adalah masalah yang sangat merugikan nasabah. Perlindungan hukum yang diharuskan Undang-undang Perbankan Syariah sejatinya tidak dapat dipisahkan dari upaya dalam sistem melindungi perbankan nasional. Kaitan antara nasabah dan bank didasarkan kepada suatu perjanjian. Untuk itu merupakan suatu keharusan apabila nasabah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Hal ini juga berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada nasabah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain regulasi dari peraturan perundang-undangan pihak perbankan juga harus memberikan perlindungan kepada nasabah mulai dari kesehatan bank, internal bank, sampai pada pelaksanaan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang wajib diterapkan pada perbankan syariah.

Banyak upaya yang dapat dilakukan perbankan syariah sebagai perlindungan hukum nasabah yakni dapat berupa perlindungan hukum langsung dan perlindungan hukum tidak langsung. Perlindungan hukum langsung merupakan hak preferen yang harus diberikan pihak bank kepada nasabah sebagai penyimpan dana. Perlindungan hukum tidak langsung merupakan perlindungan hukum yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), Batas Minimum

Kredit (BMK), kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, *merger*, konsolidasi, dan akuisisi bank. Prinsip kehati-hatian ini lah yang merupakan indikator terlaksananya perlindungan hukum nasabah yang mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya yang mana bank harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Terutama dalam praktik perbankan syariah yang harus selalu berlandaskan akan prinsip syariah. Perlindungan secara tidak langsung inilah sebagai indikator yang menjadikan edukasi perlindungan hukum nasabah terhadap perbankan syariah sangat penting untuk dilaksanakan, dikarenakan nasabah yang akan ataupun sudah menjadi nasabah perbankan syariah harus mengetahui segala bentuk akad beserta regulasi yang harus dijalankan oleh bank syariah terutama mengenai pemberian batas minimum kredit yang harus disampaikan kepada nasabah, hal ini dikarenakan nasabah hanya akan setuju dengan akad yang dilaksanakan tanpa mengetahui manfaat serta kemampuannya untuk membayar sehingga di kemudian hari terjadi hal-hal yang merugikan dikarenakan kebutuhan dana yang mendesak saat mengajukan kredit, sehingga prinsip ini harus dilaksanakan oleh bank syariah. Jika bank syariah sepenuhnya menjalankan prinsip ini maka perlindungan hukum nasabah akan terlaksana dan bank akan terhindar dari kegagalan dan permasalahan.

Perlindungan Hukum lainnya yang harus diberikan kepada nasabah perbankan syariah adalah adanya kewajiban bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Perbankan. Hal ini untuk memberikan informasi kepada nasabah, terutama nasabah

penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan lainnya berkaitan dengan bank tersebut.

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan sosialisasi edukasi perlindungan hukum nasabah perbankan syariah di Kelurahan Nangka Kota Binjai adalah bahwa lebih dari 50% masyarakat sebagai nasabah PT BRI Syari'ah yang dihadirkan tidak mengetahui perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan perbankan syariah, sementara sisanya tidak mengetahui sama sekali mengenai akad-akad pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Hal ini menjadi acuan bahwa edukasi perlindungan hukum nasabah perbankan syariah perlu dilaksanakan secara terus menerus untuk melindungi kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Pentingnya pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai perlindungan hukum nasabah akad pembiayaan perbankan syariah tentunya harus menjadi perhatian dari pihak bank dan masyarakat sendiri dalam bertransaksi di perbankan syariah. Pemahaman akan produk akad yang ditawarkan kepada masyarakat sebaiknya difahami terlebih dahulu oleh masyarakat, sebelum terikat pada akad yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak. Selain sebagai penambahan pengetahuan, kesadaran hukum masyarakat juga diharapkan meningkat, sehingga masyarakat bersikap aktif dan kritis terhadap setiap akad yang akan dilakukan. Hal ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan agar dapat meminimalisir resiko yang mungkin saja terjadi dalam setiap akad pembiayaan, dan bahkan sebagai upaya agar dapat menghindarkan dari di kerugian dikemudian hari. Selain itu diharapkan pula bagi lembaga perbankan syariah dapat menjalankan segala aktivitasnya harus mematuhi prinsip-prinsip syari'ah (menerapkan *syari'ah compliance*), tidak

hanya mengejar keuntungan semata (*profit oriented*).

Sugiyono. (2012). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Bandung: Alfabeta.
Syaiful, M. (1994). Akidah dan Syariah Islam, Terjemahan Fachruddin HS. Jakarta: Bumi Aksara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhimantra, A. Maulina, A.R. & Agustianingsih, E. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung Pada Bank Syariah. *Jurnal Elektronik*. 5: 170-177.
- Asrori. (2016). Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 3 (1).
- Cahya, B.T. (2013). Kilas Kebijakan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah di Indonesia. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. VII (1).
- Fitria, S, & Artanti, Y. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Kelompok Referensi terhadap Keputusan Pembelian. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. 8 (1): 37-48.
- Gampu, A.N, Kawet, L. & Uhing, Y. (2015). Analisis Motivasi, Persepsi, dan Pengetahuan terhadap Keputusan Nasabah Memilih PT. Bank Sulutgo Cabang Utama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 3 (3): 1330-1340.
- Hanik, S.U. & Handayani, J. (2014). Keputusan Nasabah dalam Memilih Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Nasabah Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Perbankan Indonesia*. 22 (2): 188-202.
- Harahap, T.S.R. (2020). Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Nasabah terhadap Keputusan Memilih Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. 11 (1): 1-21.
- Huriartanto, A, Hamid, D, & Shanti, P. (2015). Pengaruh Motivasi dan Persepsi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Tiket Pesawat (Survey pada Konsumen Terminal Tiket Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 28 (1): 1-9.
- Iqbal, M. Hamid, A, & Mastura. (2019). Pengaruh Motivasi Perilaku dan Pemahaman terhadap Keputusan Masyarakat dalam Memilih Bank Syariah di Aceh Tamiang. *Jurnal Investasi Islam* (2): 153-165.
- Nurlinda & Zuhirsyan, M. (2020). Mengapa Memilih Bank Syariah? (Sebuah Kajian dari Persepsi Nasabah Non-Muslim). *Bisma Cendikia: Jurnal Bisnis, Manajemen & Akuntansi*. 1 (1): 1-14.
- Rohmadi. Nurbaiti. & Junaidi. (2016). Analisa Faktor Penentu Keputusan Nasabah dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Kota Bengkulu. *MUNHAJ: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. 4 (3): 283-290.